

Implementasi Fungsi Manajemen Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Langkat Dalam Pembinaan Akidah di Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat

M Salman Alfarisi ^{a,1,*}, Farhan Indra ^{b,2}

^{ab}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
¹m.salman0104202129@uinsu.ac.id; ²farhanindra65@uinsu.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: Desember 2023

Direvisi : Januari 2024

Disetujui: Februari 2024

Kata Kunci:

Manajemen

MUI

Dakwah

Pengembangan Masyarakat

Pembinaan Akidah

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi fungsi manajemen pada Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Kabupaten Langkat, terkhususnya pada fungsi perencanaan dan fungsi penggerakan. Hasil penelitian ini mengungkap temuan: (1) Kondisi Objektif Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Kabupaten Langkat, (2) Implementasi fungsi perencanaan Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Kabupaten Langkat dilakukan dengan: memperkirakan waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan dengan menentukan sistem yang digunakan untuk menentukan sasaran dan tujuan, menetapkan dan Menyusun program, penentuan dan menetapkan jadwal waktu dan lokasi pelaksanaan, (3) Implementasi fungsi penggerakan pada Komisi Dakwah dan pengembangan Masyarakat MUI Kabupaten Langkat meliputi: memberikan pemahaman dasar tentang agama dan memberikan Reward serta mendapatkan konsumsi kepada yang hadir. Bimbingan yang dilakukan yaitu pemberian materi berupa ilmu islam yaitu Akidah serta juga disusuli nasihat-nasihat, (4) hasil implementasi fungsi manajemen pada Komisi Dakwah dan pengembangan Masyarakat MUI Kabupaten Langkat berupa: kegiatan menjadi tersusun dan terlaksana dengan efektif dan efisien, menumbuhkan semangat dan kenyamanan anggota, memudahkan dalam menentukan jadwal dan lokasi serta anggaran dan faktor lainnya, semua kegiatan berjalan dengan lancar.

Abstract: *This research aims to find out how the management function is implemented at the Langkat Regency MUI Da'wah and Community Development Commission, especially the planning and mobilization functions. The results of this research reveal the findings: (1) Objective Conditions of the MUI District Da'wah and Community Development Commission, Langkat Regency (2) Implementation of the planning function of the MUI Da'wah and Community Development Commission, Langkat Regency Steps are carried out by: estimating the right time to carry out activities by determining the system used to determine targets and objectives, determining and compiling programs, determining and determining the time schedule and location for implementation, (3) Implementing the mobilization function at the MUI Langkat Regency Da'wah and Community Development Commission. Steps include: providing a basic understanding of religion and providing rewards and food to those present. The guidance provided is the provision of material in the form of Islamic knowledge, namely Akidah and also followed by advice, (4) the results of the implementation of management functions at the Da'wah Commission and Community Development MUI Langkat Regency District. Steps include: activities are organized and carried out effectively and efficiently, foster enthusiasm and comfort among members, make it easier to determine schedules and locations as well as budgets and other factors, all activities run smoothly*

Keywords:

Management

MUI

Da'wah

Society Empowerment

Aqidah Development

I. Pendahuluan

Implementasi merujuk pada proses menerapkan atau melaksanakan suatu konsep, rencana, atau kebijakan ke dalam praktik atau tindakan nyata. Dalam berbagai konteks, implementasi dapat merujuk pada berbagai hal seperti implementasi proyek, kebijakan pemerintah, sistem perangkat lunak, strategi bisnis, dan sebagainya. (Mulyadi., 2015)

Secara umum, implementasi melibatkan serangkaian langkah atau tindakan yang dirancang untuk mewujudkan ide atau konsep ke dalam kenyataan. Ini mencakup perencanaan, pengaturan sumber daya, pelaksanaan, dan pemantauan. Penting untuk memahami bahwa implementasi tidak hanya mencakup tahap awal pelaksanaan tetapi juga melibatkan pemeliharaan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. (Paul, H., & Kenneth, 1988)

Dalam konteks bisnis atau teknologi, implementasi seringkali melibatkan pengembangan, instalasi, dan konfigurasi sistem atau solusi perangkat lunak. Implementasi juga dapat mencakup pelatihan pengguna, migrasi data, dan langkah-langkah lain yang diperlukan agar suatu inovasi atau proyek dapat berjalan dengan efektif. (Mulyadi, & Winarso, 2020)

Dalam konteks kebijakan pemerintah, implementasi merujuk pada proses menerapkan undang-undang atau kebijakan publik ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ini melibatkan penyusunan aturan, alokasi sumber daya, dan pendampingan kebijakan untuk memastikan bahwa tujuan yang diinginkan tercapai. (Sarinah, 2017)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga keagamaan yang memiliki peran sentral dalam membimbing dan memberikan arahan keagamaan bagi umat Islam di Indonesia. Sebagai wadah kumpulan ulama-ulama kharismatik dan mumpuni di bidang ilmunya, MUI bertugas menyusun fatwa-fatwa yang mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga politik. Keberadaan MUI tidak hanya sebagai pelindung ajaran agama, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan umat melalui penyuluhan keagamaan dan program-program pendidikan agama. MUI juga turut aktif dalam menjalankan fungsi sosialnya dengan berbagai inisiatif yang mendukung kesejahteraan umat Islam. Selain itu, MUI memiliki peran vital dalam menetapkan standar kehalalan produk, yang menjadi pedoman utama bagi konsumen Muslim. Sebagai lembaga yang mewakili kesatuan dan kesepakatan ulama di Indonesia, MUI memainkan peran kunci dalam membentuk dan memelihara identitas keagamaan serta moralitas umat Islam di negara ini. (Tahir, 2019)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki urgensi yang tak terbantahkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai lembaga keagamaan terkemuka, MUI menjadi pilar penting dalam memberikan panduan dan pedoman keagamaan bagi umat Muslim di Indonesia. Melalui penerbitan fatwa, MUI memberikan arahan terkait berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan politik, yang sangat memengaruhi pandangan dan perilaku umat Islam. (Nurlaela et al., 2022) Selain itu, MUI juga berperan aktif dalam pemberdayaan umat melalui penyuluhan keagamaan, pendidikan agama, dan berbagai program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup umat Muslim. Salah satu kontribusi terpenting MUI adalah dalam pengawasan produk halal, dimana sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI menjadi acuan utama bagi konsumen Muslim. Dengan demikian, MUI tidak hanya menjalankan fungsi keagamaan, tetapi juga memiliki dampak signifikan dalam membentuk moral, etika, dan kualitas hidup umat Muslim Indonesia. (Rahayu, 2022)

Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk memperdalam pengetahuan keagamaan, memahami ajaran Islam secara mendalam, dan selalu merujuk kepada sumber-sumber ilmu keagamaan yang dapat dipercaya guna melindungi Akidah dari potensi bahaya yang dapat mengancam fondasi keyakinan mereka. (Rohmah, 2018) Ketika kita membahas konsep "Rawan Akidah" dalam konteks keagamaan, kita merujuk pada potensi ancaman terhadap keyakinan dasar dalam agama Islam, yang disebut sebagai Akidah. Akidah merupakan pondasi utama bagi umat Islam, yang mencakup keyakinan terhadap keesaan Allah, risalah para rasul, kitab-kitab suci, malaikat, hari kiamat, dan takdir. Disuatu wilayah yang masih kurangnya pemahaman tentang Akidah atau kurangnya Pendidikan keagamaan maka ditakutkan daerah tersebut tidak memiliki Tingkat keamanan akidah yang sangat tinggi. (Munir, M., & Ilaihi, 2006)

Dalam menghadapi "Rawan Akidah," penting bagi umat Islam untuk membangun kesadaran kritis terhadap informasi yang diterima, menghindari pemahaman yang menyimpang atau ekstrem, serta secara aktif memperdalam pengetahuan keagamaan mereka. Melibatkan diri dalam diskusi dan pembelajaran yang positif dapat memperkuat akidah dan membantu melawan potensi ancaman terhadap keyakinan agama. Dengan demikian, menjaga keutuhan akidah menjadi tanggung jawab setiap Muslim dalam membangun fondasi spiritual yang kokoh dan mendalam (Hasanah, 2020)

Rawan Akidah juga kerap terjadi beberapa kali yang biasanya terjadi di daerah perbatasan, pedalaman, pesisir pantai, dan daerah terpencil. Pada penelitian kali ini peneliti menjadikan daerah Kecamatan Sei Bingai sebagai fokus utama. Kecamatan Sei Bingai merupakan daerah perbatasan antara Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Karo. Daerah ini menjadi rawan Akidah akibat kurang SDM Da'i di daerah tersebut. Adapun beberapa faktor lainnya seperti adat dan budaya yang kuat sehingga pemahaman agama tidak menjadi suatu hal yang diutamakan. Maka dari itu, MUI Kabupaten Langkat menyahuti keadaan tersebut untuk diadakannya program pembinaan Akidah di daerah tersebut. Untuk meneliti lebih lanjut tahap Pengimplementasian Fungsi Manajemen Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Kabupaten Langkat terhadap program pembinaan Akidah di Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat.

Dalam penelitian, penulis mengambil beberapa penelitian sebelumnya yang serupa untuk menjadi tinjauan pustaka, di antaranya: 1) Artikel yang ditulis oleh Pradana Ubaidillah, Mailin, dan Elfi Yanti Ritonga (Mingkid, 2015) berjudul "Manajemen Dakwah Majelis Ulama Indonesia Dalam Pembinaan Masyarakat Kota Medan". Hasil dalam penelitian tersebut adalah kebijakan dari MUI dalam melakukan manajemen dakwah dengan tujuan untuk mengayomi masyarakat di Kota Medan. Selain itu, dari kebijakan tersebut MUI juga harus menjadi tuntunan bagi masyarakat Kota Medan dalam kehidupan sehari-hari. 2) artikel yang berjudul "Peran Buya Gusrizal Gazahar di Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat" (2022). Hasil penelitian tersebut adalah adanya pergolakan dan perubahan sosial masyarakat di Sumatera Barat. Buya Gusrizal Gazahar merupakan figur kepemimpinan MUI yang memberikan perubahan bagi masyarakat Sumbar dikarenakan ia mengikuti isu permasalahan sosial, politik, dan agama di masyarakat. 3) artikel yang berjudul "Manajemen MUI Tapanuli Utara Dalam Membina Umat Islam di Tengah Penduduk Minoritas Muslim di Tapanuli Utara" yang ditulis oleh Sobirin dan Waizul Qarni (2003). Hasil dari penelitian tersebut adalah MUI di Tapanuli Utara yang selalu mewujudkan hubungan harmonis antara Muslim dan non-Muslim.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen sangat berperan penting dalam menunjang keberhasilan suatu usaha atau pekerjaan didalam sebuah acara yang akan dilaksanakan. Maka dari itu, peneliti kali ini mencoba menganalisis Fungsi Manajemen yang telah diterapkan oleh Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Kabupaten Langkat terhadap penanganan problematika dakwah yaitu Pembinaan Akidah yang dilaksanakan di Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, yang bertempat di Dusun I rumah galoh Musholla Al-furqan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu termasuk Jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2010) Penelitian kualitatif deskriptif adalah merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah Di mana peneliti sebagai instrument kunci (Sugiyono, 2018). Adapun Informan Penting (Narasumber) dalam penelitian ini adalah:

- Ketua Umum MUI Kab. Langkat: H. Zulkifli A. Dian, Lc, MA
- Sekretaris Umum MUI Kabupaten Langkat: Dr. Ishaq Ibrahim, MA
- Sekretaris Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat: Khairil Efendi S. Ag, S.Pd. I. MM.

- Wakil Sekretaris: Julham Akbar, S.Pd.I.
- Wakil Sekretaris I / Kepala Kesekretariatan MUI Langkat: Ismail S, Sos, I. S.Pd. S.Pd.I.
- Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat: Muliono, S.Pd. I

III. Hasil Penelitian dan Diskusi

A. Kajian Teori

Fungsi pengarahan, atau kepemimpinan, menjadi kunci dalam memotivasi dan membimbing anggota organisasi. Melalui komunikasi yang efektif, pemberian arahan yang jelas, dan pengembangan hubungan kerja yang positif, manajer dapat memastikan bahwa timnya bergerak sejalan dengan visi dan tujuan organisasi. Sementara itu, fungsi pengendalian memungkinkan manajer untuk mengukur kinerja aktual terhadap rencana yang telah ditetapkan. Dengan memonitor aktivitas dan hasil, manajer dapat mengidentifikasi penyimpangan, mengambil tindakan korektif, dan memastikan bahwa organisasi beroperasi secara efisien.(Firmansyah, 2018)

Keempat fungsi ini, saling terkait dan bersifat siklus, menciptakan kerangka kerja yang holistik untuk manajemen organisasi. Dengan menerapkan fungsi-fungsi ini secara efektif, manajemen dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memotivasi anggota tim, dan mencapai tujuan organisasi dengan sukses. (Mulyadi, & Winarso, 2020)

- Perencanaan (*Planning*): Fungsi perencanaan melibatkan penetapan tujuan organisasi dan pengembangan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Manajer merencanakan aktivitas, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
- Pengorganisasian (*Organizing*): Fungsi pengorganisasian berkaitan dengan penentuan struktur organisasi, alokasi sumber daya, dan penentuan tugas dan tanggung jawab. Manajer harus memastikan bahwa pekerjaan didistribusikan secara efisien dan bahwa orang-orang di dalam organisasi bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama.
- Penggerakan (*Actuating*): fungsi pergerakan yaitu sebuah tindakan yang dilakukan untuk mengusahakan supaya semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial serta usaha-usaha organisasi
- Pengendalian (*Controlling*): Fungsi pengendalian melibatkan pemantauan kinerja organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Manajer melakukan evaluasi, perbandingan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. (Mulyadi., 2015)

Manajemen terdiri dari beberapa unsur agar tujuan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik. Unsur manajemen juga dikenal dengan sebutan 6 M yang terdiri dari man, money, machine, methode, material, dan market. Unsur-unsur ini tidak luput dari kegiatan manajemen. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka penerapan manajemen tidak dapat berjalan dengan baik. Setiap unsur memiliki peranan dan penjelasan masing-masing yang memiliki keterkaitan satu sama lain. (Paul, H., & Kenneth, 1988)

B. Implementasi Fungsi Manajemen Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat (MUI) Kabupaten Langkat dalam Pembinaan Akidah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat berdiri 1980, sekretariat MUI Kabupaten Langkat bertempat di Jalan Diponegoro No 1 Komplek Depag Langkat-Stabat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Langkat adalah Kabupaten terluas di Sumatera Utara dengan 23 Kecamatan yang terbentang dimulai wilayah Kecamatan Bohorok yang berbatasan dengan taman Nasional Gunung Leuser, Kecamatan Sei Bingai berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo dan wilayah Kecamatan Pematang Jaya yang menghadap kebarat berbatasan dengan provinsi Aceh. Dikarenakan luasnya wilayah ini, MUI Kabupaten Langkat membagi tiga wilayah kerja diantaranya wilayah Langkat Hulu, Langkat Hilir dan Teluk Haru. (Sari, 2022)

Adanya MUI di Kabupaten Langkat ini sangat diharapkan membangun Langkat yang religius dengan membentengi umat dan menyelesaikan persoalan agama yang terjadi. MUI Kabupaten Langkat saat ini diketuai oleh H. Zulkifli Ahmad Dian, Lc, MA dan Sekretaris umum Dr. Ishaq Ibrahim, MA, serta jajaran pengurus lainnya. MUI Kabupaten Langkat juga memiliki 13 Komisi-Komisi kerja, Serta memiliki kegiatan nya masing-masing yang disesuaikan dengan keberadaan komisi-komisi MUI Kabupaten Langkat. Salah satunya Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat. Periode kepengurusan MUI Kabupaten Langkat. Berjalan selama 5 tahun setiap periodenya.



Fig. 1. Foto Bagan Struktur Kepengurusan DP MUI Kabupaten Langkat

Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Kabupaten Langkat telah melaksanakan beberapa program di daerah perbatasan dan rawan Akidah. Salah satu diantaranya di Kecamatan Sei Bingai yakni terletak di perbatasan antara Desa Kuta Rakyat Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo dengan Desa Telagah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat. Kegiatan berlangsung di Dusun I Rumah Galoh, di Musholla Al-furqan Kecamatan Sei Bingai, Program pembinaan akidah berupa pembinaan tentang pemahaman dasar akidah, pelatihan bilal mayit serta pelatihan imam dan khatib.

Struktur Kepengurusan Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat. DP MUI Kabupaten Langkat. 1) Ketua: Dr. H. Farhan Indra, MA, 2) Wakil Ketua: Drs. H. Nyak Cut Syahril, MA, 3) Sekretaris: Khairil Efendi S. Ag, S.Pd. I, MM, 4) Wakil Sekretaris: Julham Akbar, S.Pd. I, 5) Anggota: a) Syahrudin Zen, b) Drs. H. Muhammad Taher, c) H. Edy Syahputra, S. Ag, M. Pd, d) Mahyunis, S.H.I, e) Rajali, S.Pd. I, f) H. Ibnu Mubarak, S. Sos.I, g) Junaidi Abdillah, S.Pd.

Sei Bingai adalah sebuah Kecamatan yang berada di Kabupaten Langkat, provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Memiliki 15 Desa dan 1 Kelurahan, Ibu kota atau pusat pemerintahan Sei Bingai terletak di Namu Ukur. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, dan Kota Binjai. Mayoritas penduduk Kecamatan ini adalah suku Karo.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Indonesia 2000, penduduk Sei Bingai termasuk heterogen dengan mayoritas bersuku Karo. Adapun besaran penduduk kecamatan ini menurut suku bangsa ialah sorang Batak sebanyak 67,37% dengan mayoritas Karo sebanyak 64,99%, kemudian Toba sebanyak 1,96%, diikuti Mandailing serta Angkola sebanyak 0,42%. Kemudian orang Jawa sebanyak 28,75%, Minang sebanyak 0,54%, kemudian Aceh 0,37%, Melayu sebanyak 0,32%, Nias 0,19% dan suku lainnya sebanyak 2,46%.

Sedangkan agama yang dianut penduduk Sei Bingai, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021 mencatat bahwa mayoritas warga memeluk agama Islam yakni 61,63%. Sebagian besar lainnya menganut agama Kristen sebanyak 38,24%, dimana Protestan sebanyak 35,57% dan Katolik 2,67%. Sebagian kecil lagi menganut agama Buddha yakni 0,11% dan Hindu sebanyak 0,02%.(Laili, 2021)

Program pembinaan akidah di Kecamatan Sei Bingai terjadi akibat minimnya Ustadz, Da'i, dan pemuka tokoh agama Islam di daerah tersebut sehingga terkadang warga sekitar mengundang ustadz dari daerah luar. Selain itu, adanya faktor seperti melekatnya adat dan kebudayaan warga setempat, Sehingga menjadi rawan akidah jika tidak dilakukannya pembinaan.(Tambunan, 2021)

Implementasi Fungsi Manajemen Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Kabupaten Langkat diawali dengan perencanaan berupa rapat komisi atau juga disebut rapat intern (Hamzanwadi, 2023). Di dalamnya Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat membuat perencanaan berupa tujuan program dibuat, menentukan jadwal dan tempat kegiatan, penyusunan kepanitiaan, penentuan tema dan tajuk yang dibawakan, meminimalisir anggaran yang diberikan, serta menentukan pembekalan materi yang diperlukan yang kemudian perencanaan tersebut dituangkan kedalam proposal untuk diajukan ke Rapat Paripurna. (Sudiyat, M. A., 2013)

Perencanaan yang telah dituangkan kedalam proposal nantinya juga akan di musyawarahkan dalam rapat yang lebih tinggi tingkatannya dan lebih besar cangkupannya. Rapat ini juga disebut dengan Rapat Paripurna Dewan Pimpinan MUI Kabupten Langkat, yang didalamnya diikuti oleh ketua umum, sekretaris umum, pengurus harian dan seluruh komisi-komisi MUI Kabupten Langkat. Rapat berisi tentang penyampaian program kerja yang sudah disusun sesuai dengan kemampuan anggaran dan sesuai dengan ranah setiap komisi. Terdapat penentuan keputusan terhadap program yang telah dibuat, maka program kegiatan dapat dijalankan. Selanjutnya menjalankan program tersebut dan setiap komisi-komisi melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah terlaksanakan. (Saputri, S., 2018)

Dalam fungsi pengorganisasian, Komisi Dakwah dan pengembangan Masyarakat itu sendiri yang menjadi SDM ataupun penggerak dari program pembinaan Akidah ini. Namun juga terdapat beberapa bidang, dan penanggung jawab lain seperti Sekretaris Umum MUI Kabupaten Langkat dan juga disaksikan secara langsung oleh ketua MUI Kabupaten Langkat. Adapun tugas dari setiap bidang sesuai juga dengan SK yang telah ditetapkan oleh MUI Kabupaten Langkat.

Pelaksanaan program dilakukan oleh Komisi Dakwah dan pengembangan Masyarakat. Pelaksanaan berlangsung sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan seperti diawal. Baik susunan acara, pelatihan yang disampaikan hingga, pemberian reward berjalan dengan baik. Pada tahapan ini, acara atau kegiatan dimulai dengan dimulainya pembukaan acara, kemudian pembacaan ayat suci alquran, kata sambutan dari pihak penyelenggara dan juga tokoh Masyarakat sekitar. Doa sebelum kegiatan pelatihan dimulai dan setelahnya di isi dengan acara inti yakni pembekalan materi dan pelatihan. (Mulyadi, A., Shaleh, K., & Suhendi, 2019)

Terdapat beberapa program yang terlaksanakan oleh Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Kabupaten Langkat pada acara kegiatan pembinaan akidah di Kecamatan Sei Bingai ialah pertama melakukan pembinaan bimbingan keagamaan terutama masalah Akidah kepada masyarakat, melaksanakan pembinaan atau pelatihan bilal mayit dan tata cara pelaksanaannya, melaksanakan pelatihan imam dan khatib kepada generasi muda dan remaja masjid, pelatihan sholat dan membaca al-quran, dan dari MUI Kabupten Langkat memberikan arahan untuk penyuluh agama di Kecamatan Sei Bingai agar mengrimkan tenaga Da'i yang bertugas di daerah tersebut agar rutin mengirimkan ustadz untuk menjadi khatib serta penceramah bagi kaum ibu, kaum bapak dan anak-anak. (Mantu, 2018)

Pengawasan dalam kegiatan kali ini memiliki dua maksud yang berbeda Dimana pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Kabupaten Langkat itu sendiri dan juga pengawasan dari Dewan Pengawas MUI Kabupaten Langkat. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Dakwah dan pengembangan masyarakat berupa pengawasan agar program

dapat berjalan dengan sesuai perencanaan dan berhasil secara menyeluruh. Adapun indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan dari program pembinaan Akidah yang dibuat berupa *feedback* dan respon dari warga Kecamatan Sei Bingai. Seperti, antusiasnya warga terhadap program Latihan yang diberikan. Selain mengukur Tingkat keberhasilan program pembinaan Akidah ini, komisi juga tetap melaksanakan evaluasi terhadap warga sekitar terkait pembekalan materi yang mereka terima tidak lari dari pemahaman agama. Evaluasi tetap berlangsung secara berkala sehingga warga di Kecamatan Sei Bingai tetap mendapatkan perhatian khusus setelah program pembinaan Akidah telah terlaksana. (Tohri, M., & Ardian, 2020)

Fungsi pengawasan yang diterapkan oleh Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Langkat. Berupa pengawasan tentang terhadap Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat dan lebih memfokuskan terkait anggaran yang diberikan kepada komisi dalam menjalankan tugasnya. Sekretaris Umum MUI Kabupaten Langkat juga turun guna melakukan pengawasan agar berjalan sesuai dengan hal yang di inginkan.

Hasil dari implementasi fungsi manajemen memudahkan kinerja Komisi Dakwah dan pengembangan Masyarakat. Membuat program lebih terstruktur, efektif dan efisien. Dengan menerapkannya fungsi manajemen ini dapat meminimalisir resiko dan meningkatkan keberhasilan program terlaksana. Selain itu, dengan menerapkannya fungsi manajemen dapat meminimalisir anggaran yang di pergunakan.

IV. Kesimpulan

Implementasi Fungsi Manajemen Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Kabupaten Langkat diawali dengan perencanaan berupa rapat komisi atau juga disebut rapat intern. Didalamnya Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat membuat perencanaan berupa tujuan program dibuat, menentukan jadwal dan tempat kegiatan, penyusunan kepanitiaan, penentuan tema dan tajuk yang dibawakan, meminimalisir anggaran yang diberikan, serta menentukan pembekalan materi yang diperlukan yang kemudian perencanaan tersebut dituangkan kedalam proposal untuk diajukan ke rapat besar. Rapat ini juga disebut dengan sebutan Rapat Paripurna, yang didalamnya terdapat penentuan Keputusan terhadap program yang telah dibuat. Pengawasan dalam kegiatan kali ini memiliki dua maksud yang berbeda Dimana pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Dakwah dan pengembangan Masyarakat itu sendiri dan juga pengawasan dari setjen MUI Kabupaten Langkat. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Dakwah dan pengembangan masyarakat berupa pengawasan agar program dapat berjalan dengan sesuai perencanaan dan berhasil secara menyeluruh. Adapun indicator untuk mengukur titik keberhasilan dari program pembinaan Akidah yang dibuat berupa *feedback* dan respon dari warga Kecamatan Sei Bingai. Selain mengukur Tingkat keberhasilan program pembinaan Akidah ini, komisi juga tetap melaksanakan evaluasi terhadap warga sekitar terkait pembekalan materi yang mereka terima tidak lari dari pemahaman agama. Fungsi pengawasan yang diterapkan oleh setjen MUI Kabupaten Langkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, A. (2018). *Pengantar Manajemen*. Deepublish.
- Hamzanwadi. (2023). Manajemen Dakwah dan Moderasi Beragama di Kawasan Wisata Mandalika Lombok Tengah. *Mudabbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 4(2), 142–154.
- Hasanah, U. (2020). *Manajemen Dakwah*. KAFF Publishing.
- Laili, W. A. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Dakwah MUI Kota Medan Tahun 2016-2021. In *UIN Sumatera Utara*.
- Mantu, R. (2018). Torang Samua Basudara”(Manajemen Dakwah Berbasis Kearifan Lokal di Kota Manado). *Potret Pemikiran*, 19(2).
- Mingkid, E. (2015). Penggunaan media komunikasi promosi pariwisata oleh pemerintah Kota Manado. *Sosiohumaniora*, 17(3), 188–192.

- Mulyadi, & Winarso, W. (2020). *Pengantar Manajemen*. UGM Press.
- Mulyadi, A., Shaleh, K., & Suhendi, H. (2019). Manajemen Dakwah MUI Kecamatan Cicalengka. *Prosiding Komunikasi Penyiaran Islam*, 5(2), 92–98.
- Mulyadi. (2015). *Implementasi Organisasi*. UGM Press.
- Munir, M., & Ilaihi, W. (2006). *Manajemen Dakwah*. Kencana Publishing.
- Nurlaela, L. F., Boeriswati, E., & Tajuddin, S. (2022). Gaya Bahasa Komunikasi Dakwah Dalam Ceramah Syekh Sulaiman Bin Salimullah Ar Ruhaily. *BAHTERA : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 21(1), 72–93. <https://doi.org/10.21009/bahtera.211.06>
- Paul, H., & Kenneth, B. (1988). *Management of Organization Behavior (Fifth Edition)*. Prentice Hall.
- Rahayu, M. N. I. (2022). *Implementasi Fungsi Manajemen Dakwah Wasathiyah Majelis Ulama Indonesia Kota Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Paham Radikalisme*. UIN Raden Intan.
- Rohmah, N. N. (2018). Peningkatan Peran Pendakwah Perempuan di Masyarakat di Desa Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Analisis Teori Kelompok Bungkam (Muted Group Theory) dan Teori Feminisme. *Al-I'lam: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1(2), 17. <https://doi.org/10.31764/jail.v1i2.228>
- Saputri, S., & B. (2018). Penggerak Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nagari Tanjung Balit Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok. *Al Imam: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(1), 1–8.
- Sari, D. N. (2022). *Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia Dalam Pembinaan Keagamaan Mualaf di Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat*. UIN Sumatera Utara.
- Sarinah, & M. (2017). *Pengantar Manajemen*. Deepublish.
- Sudiyat, M. A., & S. (2013). Konsep dan Manajemen Dakwah Islam di Era Digital. *Moderation: Journal of Islamic Studies Review*, 3(1), 123–134.
- Sugiyono. (2010). Metode penelitian kuantitatif dan R&D. *Bandung: Alfabeta*.
- Tahir, M. (2019). *Implementasi Manajemen Dakwah Pada Majelis Ulama Indonesia (MUI)*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Tambunan, M. (2021). *Manajemen Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Membina Akhlak Pemuda di Kota Padangsidempuan*. IAIN Padangsidempuan.
- Tohri, M., & Ardian, R. (2020). Restropeksi Sikap MUI NTB Terhadap Paham Sempalan Trans-Nasional Dalam Manajemen Dakwah. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(1), 11–25.